

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian global kepada berbagai isu keberlanjutan lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*) atau ESG semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir (Melinda & Wardhani, 2020). ESG telah menjadi topik yang mendominasi agenda bisnis dan investasi global, terutama karena kesadaran yang semakin tinggi mengenai dampak perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan pentingnya pengelolaan perusahaan secara optimal (Yong, 2023). Berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, kreditor, regulator, aktivis di bidang sosial dan lingkungan, serta media, mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik korporasi yang lebih patuh dan berkelanjutan (Arif et al., 2020). Karena alasan ini, ESG telah menjadi komponen utama dalam strategi bisnis dan investasi global, memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

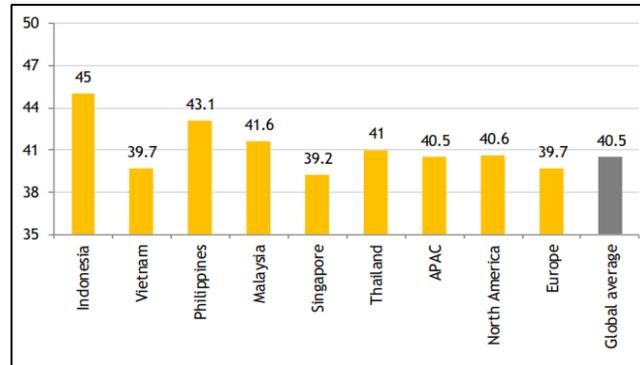
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komitmen Net Zero Emission 2050 yang digaungkan oleh *World Economic Forum* semakin mengukuhkan ESG sebagai agenda sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Laporan ESG telah menjadi salah satu alat penting untuk mengukur seberapa jauh perusahaan berkontribusi terhadap tujuan tersebut. Tidak hanya itu, investor global kini memanfaatkan kinerja ESG sebagai faktor penting dalam menentukan keputusan investasi (Dmuchowski et al., 2023; Lo & Lin, 2023). Menurut studi yang dilakukan *Bloomberg Intelligence*, aset ESG global diproyeksikan akan melampaui \$53 triliun pada tahun 2025, yang mencakup lebih dari sepertiga

dari total aset yang dikelola yang diproyeksikan mencapai \$140,5 triliun (Diab & Adams, 2021). Hal ini menunjukkan betapa krusialnya pengungkapan ESG bagi keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Dalam konteks global, tantangan yang dihadapi perusahaan semakin kompleks, pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki tingkat risiko ESG yang cukup tinggi (Shah et al., 2022). Risiko lingkungan di Indonesia, misalnya, termasuk dalam kategori kritis karena tingginya tingkat deforestasi, pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem. Secara sosial, isu seperti ketimpangan pendapatan, hak-hak buruh, serta hak masyarakat adat masih menjadi tantangan besar. Di sisi tata kelola, masalah transparansi, korupsi, dan manajemen risiko menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan secara serius. Semua ini menambah risiko ESG yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia, yang pada akhirnya memengaruhi citra dan kinerja keuangan mereka di mata investor dan masyarakat.

Shah et al., (2022) menjelaskan dalam *Maybank Investment Banking Group (MIBG) sustainability research*, bahwa Indonesia pada tahun 2022 memiliki tingkat risiko ESG yang sangat tinggi (45%) dibandingkan dengan rata-rata global (40.5%), bahkan menempati posisi tertinggi di kawasan Asia Tenggara (berkisar antara 39.2% hingga 43.1%) seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Fenomena risiko ESG yang tinggi semakin mendesak perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan kinerja ESG mereka, mengingat tekanan yang semakin besar dari investor global dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat terhadap isu lingkungan dan sosial. Sayangnya, penilaian investor terhadap kualitas pengungkapan ESG perusahaan-perusahaan di Indonesia masih relatif rendah (Redita et al., 2024). Hal ini

mengindikasikan adanya kesenjangan antara ekspektasi investor akan informasi ESG yang transparan dan akuntabel dengan praktik pengungkapan ESG yang masih terbatas di Indonesia.



Gambar 1. Risiko ESG Tahun 2022

Sumber : MIBG Sustainability Research dalam Shah et al., (2022)

Pengungkapan ESG sangat penting karena mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Di Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan terbuka melaporkan aspek ESG sesuai standar GRI (Redita et al., 2024). Namun, pedoman ini belum dapat diandalkan untuk membandingkan perusahaan, baik di dalam satu industri maupun antarindustri (Almeyda & Darmansya, 2019). Perbedaan kompleksitas, konten, dan gaya pelaporan juga bisa membuat penilaian kinerja ESG menjadi sulit dan ambigu (Redita et al., 2024). Namun demikian, pengungkapan ESG sebagian besar bersifat sukarela dan tidak kongruen karena tidak adanya kerangka pelaporan yang terstandarisasi (Arif et al., 2020; Goel, 2018).

Sebuah publikasi dari *Center for Risk Management & Sustainability* (2022) tentang realisasi Environmental, Social, and Governance (ESG) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki

persentase realisasi ESG terendah di kawasan Asia Pasifik seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Australia menempati posisi terdepan dengan realisasi ESG lebih dari 50%, menandakan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Taiwan dan Thailand juga menunjukkan kemajuan yang cukup baik dengan masing-masing mencapai 30% dan 25%. Di belakangnya, Singapura dan Jepang mencatatkan realisasi sekitar 20%, menunjukkan kesadaran yang mulai berkembang meskipun belum mencapai tingkat yang optimal. Sementara itu, negara-negara yang termasuk dalam kategori masih tertinggal seperti Filipina, Indonesia, India, Malaysia, dan Vietnam dengan kurang dari 10% perusahaan yang secara signifikan telah mengadopsi ESG, mencerminkan tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan implementasi di wilayah tersebut.

Tabel 1 Persentase Realisasi ESG Tahun 2022

Negara	% Realisasi ESG
Australia	> 50%
Taiwan	30%
Thailand	25%
Singapura, Jepang	20%
Filipina, Indonesia, India, Malaysia, Vietnam	< 10%

Sumber : *Center for Risk Management & Sustainability* (2022)

Pusat Penelitian Tata Kelola, Kelembagaan, dan Organisasi di Universitas Nasional Singapura (NUS) menemukan bahwa kualitas ESG perusahaan di Indonesia tergolong rendah, dengan skor 48,8 berdasarkan indikator ESG dari kerangka Global Reporting Initiative (GRI), dibandingkan dengan Singapura dan Thailand (Suastha, 2016). Rendahnya kualitas pengungkapan ESG di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab komite audit dalam memantau praktik pengungkapan ESG oleh manajemen. Efektivitas peran komite audit perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana mereka berkontribusi dalam membantu dewan komisaris mengawasi agar pengelolaan perusahaan di Indonesia menjadi lebih transparan dan

objektif dalam pengungkapan ESG, guna melindungi pemangku kepentingan dari perilaku oportunistik manajemen.

Akibatnya, muncul kekhawatiran tentang kualitas dan objektivitas pelaporan ESG (Arif et al., 2020). Penerapan sistem pelaporan yang kuat membutuhkan standar yang ketat, yang belum ada dalam pengungkapan ESG. Oleh karena itu, pengendalian internal yang independen dan aktif diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan ESG tanpa mengorbankan objektivitas atau kepentingan pemegang saham. Menurut Appuhami dan Tashakor (2017), komite audit yang independen dan aktif terlibat dapat memberikan pengawasan yang efektif dalam menyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemangku kepentingan terkait ESG. Komite audit adalah elemen kunci dalam tata kelola perusahaan yang berperan penting dalam memastikan efektivitas serta kualitas pelaporan non-keuangan, khususnya terkait isu keberlanjutan (Pozzoli et al., 2022). Namun, terdapat argumen menyebutkan jika kompetensi komite audit tidak selalu menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas pelaporan ESG, karena faktor-faktor eksternal seperti tekanan pasar dan kepentingan politik dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh komite tersebut (Alfandia & Putri, 2023; Cho & Song, 2017).

Dua atribut utama komite audit yang sering dikaji dalam literatur terkait dampaknya terhadap pengungkapan ESG adalah independensi dan keahlian komite audit. Independensi berarti bahwa tidak adanya hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan manajemen, sehingga komite audit dapat menjalankan pengawasan secara objektif (Pernamasari & Chariri, 2024). Independensi ini menjadi penting karena memungkinkan komite audit untuk mengkritisi kebijakan dan pengungkapan perusahaan, termasuk dalam hal ESG, tanpa intervensi dari pihak manajemen (Arif et al., 2020). Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin independen komite

audit, semakin baik kualitas pengungkapan ESG, karena pengawasan yang lebih ketat dilakukan terhadap pengelolaan isu-isu keberlanjutan di perusahaan (Almutair & Al Barrak, 2024; Arif et al., 2020; A. M. Buallay & AlDhaen, 2018; Matta et al., 2024; Pozzoli et al., 2022; Redita et al., 2024).

Komite audit yang independen sangat penting dalam memastikan keputusan yang diambil manajer tidak berpihak pada kepentingan satu pihak saja, melainkan mengikat seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan. Sebagai penghubung antara auditor eksternal dan perusahaan, serta antara komisaris independen dan auditor internal, komite audit harus bertindak secara objektif (Aprianti et al., 2021). Tindakan independen komite audit memperkuat mekanisme pengawasan perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya keagenan, sebagaimana diungkapkan oleh penelitian yang menunjukkan independensi komite audit akan memperkuat kualitas pengawasan serta mengurangi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan (Alderman & Jollineau, 2020). Dengan demikian, memahami bagaimana karakteristik komite audit berkontribusi pada pengambilan keputusan dan penyampaian informasi yang sesuai bagi pemangku kepentingan, termasuk dalam laporan ESG, menjadi hal yang penting.

Keahlian komite audit juga memainkan peran signifikan dalam memastikan kualitas pengungkapan ESG. Pengalaman anggota komite audit pada aspek keuangan, akuntansi atau keberlanjutan cenderung mempunyai kapasitas lebih unggul dalam mengevaluasi relevansi dan kualitas informasi yang diungkapkan. Dalam konteks ESG, informasi yang diungkapkan sering kali bersifat kualitatif dan non-keuangan, sehingga memerlukan pemahaman mendalam tentang indikator keberlanjutan dan risiko yang relevan. Meskipun demikian, terdapat argumen yang menyatakan jika kompetensi anggota komite audit tidak selalu memberikan dampak positif terhadap mutu laporan ESG, karena faktor-faktor lain seperti tekanan dari manajemen dan pemilik

mayoritas dapat mempengaruhi keputusan yang diambil (Redita et al., 2024). Studi terdahulu menunjukkan keahlian komite audit dapat berperan dalam mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengelola dan melaporkan kinerja ESG mereka (Almutair & Al Barrak, 2024; Aprianti et al., 2021; Matta et al., 2024; Narullia et al., 2024; Pernamasari & Chariri, 2024; Pozzoli et al., 2022).

Penelitian tentang pengaruh atribut komite audit, seperti independensi dan keahlian, terhadap kuantitas dan kualitas pelaporan ESG masih terbatas dan belum memberikan hasil yang konsisten. Menurut Aprianti et al., (2021), Narullia et al., (2024) dan Pernamasari & Chariri (2024), independensi komite audit tidak memiliki dampak terhadap pengungkapan ESG. Sari & Fitriani (2023) mengungkapkan bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengungkapan ESG. Hal tersebut disebabkan oleh anggota komite audit independen yang kerap menghadapi kendala dalam membuat keputusan strategis harian yang mendukung kinerja ESG (Pernamasari & Chariri, 2024). Selain itu, keputusan terkait ESG lebih sering dikendalikan oleh manajemen eksekutif dan pemilik mayoritas yang mungkin memiliki prioritas berbeda (Narullia et al., 2024).

Buallay & AIDhaen (2018) menunjukkan hasil dimana keahlian yang dimiliki komite audit berdampak negatif terhadap pelaporan ESG. Lebih lanjut, Buallay & AIDhaen (2018) menjelaskan komite audit cenderung lebih fokus pada pelaporan keuangan tradisional daripada isu keberlanjutan. Mereka mungkin kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai pelaporan ESG yang memerlukan perspektif yang lebih luas di luar keuangan (A. M. Buallay & AIDhaen, 2018). Selain itu, ahli keuangan tidak selalu memiliki otoritas atau pengaruh yang cukup dalam

pengambilan keputusan strategis terkait ESG, sehingga rekomendasi mereka sering kali tidak berkontribusi secara efektif terhadap peningkatan pengungkapan keberlanjutan.

Redita et al., (2024) menegaskan jika keahlian komite audit tidak memiliki dampak signifikan terhadap pelaporan ESG. Temuan ini konsisten dengan Appuhami & Tashakor (2017), Josua & Septiani (2020) dan Setiawan & Ridaryanto (2022). Penelitian tersebut menegaskan jika peningkatan keterampilan keuangan dalam komite audit tidak secara otomatis meningkatkan tingkat pengungkapan ESG perusahaan (Buallay & Al-Ajmi, 2018). Kemungkinan besar, hal ini disebabkan oleh kecenderungan komite audit dengan keahlian finansial untuk lebih memusatkan perhatian pada pelaporan keuangan (Appuhami & Tashakor, 2017).

Hasil penelitian yang beragam mengenai peran atribut komite audit terhadap pelaporan ESG menciptakan kesenjangan dalam literatur. Belum ada kesimpulan yang jelas terkait pengaruh independensi dan keahlian komite audit terhadap pengungkapan ESG. Studi ini menghadirkan kebaruan dengan fokus pada perusahaan di Indonesia, yang masih tertinggal dalam implementasi ESG dibandingkan negara lain di Asia, serta mencoba mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pengungkapan ESG dalam konteks tersebut.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh independensi serta kompetensi komite audit terhadap kualitas dan kuantitas pelaporan ESG, yang sebelumnya sering difokuskan pada salah satu aspek saja. Kualitas pelaporan ESG lebih banyak diteliti oleh para akademisi yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas perusahaan sesuai dengan *framework* yang berlaku secara global seperti GRI (Arif et al., 2020). Sementara itu, kuantitas pelaporan ESG biasanya dianalisis oleh peneliti yang tertarik pada nilai informasi yang diungkapkan perusahaan yang diprosikan dengan skor ESG (Arif et al., 2020; Narullia et al., 2024; Pozzoli et al., 2022; Redita

et al., 2024). Dengan demikian, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dalam memperjelas peran independensi serta keahlian komite audit dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan ESG, khususnya di negara berkembang.

Di Indonesia, fenomena pengungkapan ESG masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dalam kapasitas perusahaan untuk memahami dan menerapkan indikator keberlanjutan secara tepat (Redita et al., 2024). Pengawasan ketat dari komite audit sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan pelaporan ESG. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis pengaruh independensi serta keahlian komite audit terhadap kualitas serta kuantitas pengungkapan ESG pada perusahaan publik non-keuangan di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data terbaru yang memberikan wawasan lebih mendalam mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut di perusahaan-perusahaan Indonesia. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, serta adanya celah dalam penelitian dan kebaruan yang ditawarkan, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti topik dengan judul **“Pengaruh Independensi dan Keahlian Komite Audit terhadap Kualitas dan Kuantitas Pengungkapan ESG di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam studi ini, yaitu :

- 1) Apakah kualitas pengungkapan ESG dipengaruhi oleh independensi Komite Audit?
- 2) Apakah kuantitas pengungkapan ESG dipengaruhi oleh independensi Komite Audit?
- 3) Apakah kualitas pengungkapan ESG dipengaruhi oleh keahlian Komite Audit?
- 4) Apakah kuantitas pengungkapan ESG dipengaruhi oleh keahlian Komite Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka studi ini bertujuan untuk melakukan pengujian empiris dan analisis pengaruh dari:

- 1) Independensi Komite Audit terhadap kualitas pengungkapan ESG
- 2) Independensi Komite Audit terhadap kuantitas pengungkapan ESG
- 3) Keahlian Komite Audit terhadap kualitas pengungkapan ESG
- 4) Keahlian Komite Audit terhadap kuantitas pengungkapan ESG

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Studi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur tentang tata kelola perusahaan, khususnya dalam hal peran komite audit dalam pengungkapan ESG. Dengan mengeksplorasi dampak dari independensi serta keahlian komite audit terhadap kualitas dan kuantitas pelaporan ESG, penelitian ini berusaha menjawab gap yang ada dalam literatur terkait peran spesifik komite audit di Indonesia sebagai negara berkembang. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor tata kelola yang mendorong akuntabilitas serta transparansi perusahaan pada aspek ESG. Temuan dari studi ini digunakan sebagai acuan bagi studi-studi berikutnya yang berfokus pada ESG dan tata kelola perusahaan di berbagai negara berkembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Studi ini mampu memberikan wawasan praktis kepada perusahaan di Indonesia mengenai urgensi independensi dan keahlian komite audit dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan ESG. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan memahami peran strategis komite audit dalam mengelola risiko keberlanjutan serta memperkuat kepercayaan dari investor dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Selain itu, regulator dan pembuat kebijakan bisa memanfaatkan hasil temuan ini sebagai landasan dalam menyusun kebijakan yang mendorong pengungkapan ESG yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan begitu, penelitian ini juga bisa menjadi panduan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja ESG mereka untuk bersaing di pasar global.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam studi ini disusun menjadi lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan, yang mencakup pembahasan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua memuat landasan teori, yang meliputi konsep-konsep dasar yang relevan dengan permasalahan penelitian, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, serta pengembangan hipotesis. Bab ketiga menjelaskan metode penelitian, yang terdiri atas desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, metode analisis data, serta prosedur pengujian hipotesis. Bab keempat menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup deskripsi data, hasil analisis penelitian, serta interpretasi dari hasil tersebut. Bab kelima, sebagai bagian penutup, berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi hasil penelitian, dan rekomendasi untuk studi mendatang.